

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah kota/kabupaten sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.

Peningkatan Belanja barang dan jasa di Kota atau Kabupaten akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam menyediakan infrastruktur. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pengeluaran daerah yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan roda ekonomi daerah adalah belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas

pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik. Dalam UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya dapat meningkatkan belanja daerah dengan cara mengoptimalkan penerimaan, baik Dana Perimbangan (DAU dan DAK) maupun Pendapatan Asli Daerahnya.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Daerah yang memiliki kemajuan dalam industrinya dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi yang sudah dianggarkan sesuai dengan perwujudan desentralisasi dan dapat dijadikan indikator untuk menilai kemandirian daerah itu sendiri (Ramadan, 2018). Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Puadah (2017) Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan

meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja Barang dan Jasa merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAU ini merupakan bagian dari Pendapatan transfer yang digunakan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di samping DAU, ada yang dimaksud dengan Dana Alokasi khusus (DAK) pada dana perimbangan. DAK ini merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional maupun non-operasional pada kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk mencatat pembelian barang dan jasa yang habis dipakai, memproduksi barang dan jasa, dan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah daerah.

Dapat dilihat pada Fenomenanya, Menurut Erni Nur'aeni (2019) Dalam Seminar pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada tahun 2019 KPK menyatakan Kota Tasikmalaya masih memiliki indikator area pengadaan Barang dan Jasa yang rendah di angka 21%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menguasai strategi pengadaan barang dan jasa dan prinsip transparansi guna menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang semakin baik dengan menciptakan pengadaan barang dan jasa yang dinamis.

Pengadaan Barang dan jasa yang rendah dapat bersumber dari beberapa faktor, Mulai dari permasalahan adanya pemufakatan yang tidak benar antara penyedia dengan panitia pengadaan atau proses pengadaan yang kurang transparan dan tidak falid (Nur'aeni, 2019).

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi dan daya dukung ekonomi yang terus berkembang. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya sebagaimana tercermin dalam APBD, terlihat terus meningkat. Sehingga dengan peningkatan tersebut kontribusi PAD terhadap APBD juga ikut meningkat. PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU dan DAK (Kusmayadi, 2019).

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa, dapat ditempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan sejauh mana implementasi penerimaan PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap anggaran Belanja Barang dan Jasa di Kota Tasikmalaya.

Pada penelitian ini Penulis mengambil referensi dari beberapa peneliti terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah dalam proses penelitian penulis dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Barang dan jasa pemerintah Kota Tasikmalaya”, yaitu sebagai berikut:

M.Pealelu (2013) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*”. Diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Rinaldi (2016) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan*”. Diperoleh hasil bahwa secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

A.Karyadi (2017) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*". Diperoleh hasil bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Puadah (2017) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Kinerja Keuangan*". Diperoleh hasil bahwa secara Parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Diena Novieta Durie (2017) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah*". Diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dana Alokasi Umum tetapi secara parsial Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

Erna Agustia (2017) melakukan penelitian dengan judul “*pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis)*”. Diperoleh hasil bahwa Secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Ilham Ramadhan (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2007-2016*”. Diperoleh hasil bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Tasikmalaya. Secara simultan, Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Kusmayadi (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah*”. Diperoleh hasil bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja pemerintah. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

Andriani & N. Wahid (2018) melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”*. Diperoleh hasil bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pebrianti (2019) melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2017)”*. Diperoleh hasil bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Table 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1.	Andreas Marzel Pelealu (2013) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah • Indikator: Total DAU dan Total PAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y: Belanja Modal 	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.	Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 Desember 2013 : 1189-1197
2.	Abel Rinaldy (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan • Indikator: total PAD dan Dana perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y: Belanja modal 	Secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamma diyah Palembang, 2016.

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
3.	Santika Adhi Karyadi (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus • Indikator: Total PAD, DAU dan DAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y: Belanja Modal • Indikator: Total Belanja Modal 	Secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.	Jurnal jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
4.	Popy sopiatul puadah (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Kinerja Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus • Indikator: Total PAD, DAU, dan DAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y: Kinerja Keuangan • Indikator: Rasio Kemandirian: $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ X 100%, Rasio Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}}$ X 100% 	Secara Parsial Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi.

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
5.	Diena Novieta Durie (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. • Indikator: Total PAD dan Total DAU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y: Belanja Daerah • Indikator: Total Belanja Daerah. 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi
6.	Erna Agustia (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal (studi kasus pada BPKAD kabupaten Ciamis)	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Dana Bagi Hasil • Variabel Y: Alokasi belanja Modal • Indikator: Total Dana bagi hasil dan belanja Daerah 	Secara parsial DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi.
7.	Ilham Ramadhan (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2007-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah • Indikator: Total DAU dan PAD. 	Variabel Y: Belanja Daerah	Secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, DAU dan PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi.

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
8.	Dedi Kusmayadi (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Varabel X: Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah • Indikator: Total DAU dan PAD 	Variabel Y: Belanja Pemerintah Daerah	secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja pemerintah. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Vol. 8, No 1, Januari-Juni 2013.
9.	R. Neneng Rina Andriana dan Nisa Noor Wahid (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan • Indikator: Total PAD dan Dana Perimbangan 	Variabel Y: Kemandirian Keuangan Daerah	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi ISSN: 1907-9958 Vol. 13 No.1 Januari-Juni 2018 (30-39).

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
10.	Tineke Ayudia Pebrianti (2019) Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal (studi pemerintahan provinsi jawa tengah tahun 2008-2017)	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Variabel Y: Belanja Modal	Secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi.
11.	Heppi Syofya dan Hendra Gustomi (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: Pendapatan Asli Daerah • Variabel Y: Belanja Barang dan Jasa • Indikator: Total Pendapatan Asli daerah dan Total Belanja Barang dan Jasa 	Metode penelitian: Uji Regresi Linier Sederhana	Secara Parsial dan Simultan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja barang dan jasa pemerintah kabupaten Kerinci pada tahun 2009-2016.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis ISSN: 1829-9822 Vol. 17 No.1. Maret 2020 : 72-78
12.	Sugeng Haryanto (2012) Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap modal & belanja barang dan jasa provinsi jawa timur 2006-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X: PAD, DAU dan DAK. • Variabel Y: Belanja Barang dan Jasa • Indikator: Total PAD, DAU, DAK dan Belanja Barang dan Jasa 	Variabel Y: Belanja Modal	Secara parsial PAD, & DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Barja. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan belanja Barja. Secara simultan PAD, DAU & DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal & belanja Barja.	Jurnal Ilmiah keuangan perbankan, Universitas Merdeka malang. Vol. 9 Nomor. 02. Juni 2013.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Barang dan Jasa (Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial dan simultan terhadap Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial dan simultan

terhadap Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1 Bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2 Bagi pemerintah kota Tasikmalaya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam pengelolaan Belanja Barang dan Jasa.

3 Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data yang bersumber dari

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kota Tasikmalaya atau di Website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tasikmalaya (www.bpkad.tasikmalaya.go.id).

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2021 guna memperoleh informasi dan mengolah data atau informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Rincian waktu kegiatan penelitian (terlampir).